Pengajuan Informasi yang diusulkan untuk dikecualikan bagi publik
PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Usulan Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)
1	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
2	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi, dapat menghambat proses penegakan hukum
3	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
4	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi
5	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Dapat mengungkap rahasia pribadi
6	Soal, jawaban, nilai ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
7	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris	Dapat mengungkap rahasia pribadi, dapat menghambat proses penegakan hukum
8	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
9	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik
10	Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi
11	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
12	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
13	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Dapat mengungkap rahasia pribadi
14	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi
15	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Dapat mengungkap rahasia pribadi
16	Arsip/surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dapat mengungkap rahasia Negara, dapat mengungkap rahasia Badan publik
17	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
18	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
19	Laporan keuangan tahun berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
20	Laporan pelaksanaan anggaran	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
21	Dokumen kepemilikan tanah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
22	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata uaha negara, dan agama	Dapat mengungkap rahasia Badan Publik, dapat mengungkap rahasia pribadi, dapat menghambat proses penegakan hukum